

Dampak Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Konservasi Alam: Studi Kasus Pandangan Staf BKSDA



Atika Aprilia Juissa ^{a,1,*}, Anggun Kurnianingsih ^{b,2}, Suryaningsi Suryaningsi ^{c,3}

^a Program Studi Pendidikan Masyarakat, Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ apriliajuisatika@gmail.com *; ² anggunkurnianingsih33@gmail.com; ³ suryaningsi@fh.unmul.ac.id

* Corresponding Author

ABSTRACT

Konservasi lingkungan merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan, namun dalam praktiknya masih sering mengabaikan perspektif gender. Perempuan memiliki pengetahuan lokal dan kontribusi signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi menghadapi berbagai hambatan struktural yang membatasi partisipasi mereka, khususnya dalam kegiatan lapangan. Perbedaan peran, tanggung jawab, dan ketergantungan laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya alam menyebabkan dampak lingkungan dan upaya konservasi dirasakan secara berbeda. Oleh karena itu, konservasi yang efektif dan adil harus bersifat responsif gender dengan mengakui serta memanfaatkan peran unik dan pengetahuan kedua kelompok. Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif berskala kecil dengan studi kasus ilustratif melalui wawancara mendalam terhadap seorang staf perempuan di BKSDA Kalimantan Timur. Analisis dilakukan menggunakan perspektif ekofeminisme, kerangka kebutuhan praktis dan strategis Moser, serta Sustainable Livelihoods Framework (SLF). Hasil analisis tematik menunjukkan beberapa tantangan utama, yaitu keterbatasan infrastruktur dasar seperti toilet dan akses air bersih, terbatasnya mobilitas ke lokasi terpencil yang memicu pembagian kerja berbasis gender, kebutuhan mendesak akan fasilitas ramah gender, peran penting perempuan dalam kegiatan persemaian, serta minimnya penerangan di lokasi tertentu. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan praktik konservasi.

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2025-11-03

Revised 2025-12-20

Accepted 2026-01-05

Keywords

pandangan staf BKSDA, konservasi lingkungan, perempuan, ekofeminisme, pembangunan berkelanjutan

1. Pendahuluan

Konservasi alam adalah salah satu aspek krusial dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dan juga upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, untuk mencegah kepunahan berbagai spesies-spesies yang mulai langka, dan melestarikan keanekaragaman hayati bagi generasi-generasi yang akan mendatang tetapi pelaksanaannya sering kali mengabaikan aspek gender. Padahal peran para Perempuan di sini sangat dibutuhkan, karena mereka memiliki pemahaman tentang ekologi lokal, memiliki pengalaman langsung yang lebih dalam tentang bagaimana cara pengelolaan sumber daya, serta mereka juga berperan penting dalam mempertahankan keberlangsungan ekosistem. Meskipun demikian, partisipasi mereka sering terhalang oleh kendala struktural, seperti kurangnya fasilitas dasar, infrastruktur yang tidak memperhatikan ramah gender, dan pembagian tugas yang didasarkan pada stereotip.

Penelitian ini mengkaji tentang pengalaman perempuan dalam lembaga konservasi dengan menganalisis kendala fasilitas dan infrastruktur yang mereka temui di lapangan. Kekurangan akses air bersih, sanitasi yang memadai, dan dukungan logistik menjadi rintangan yang tidak hanya berpengaruh terhadap kenyamanan saja, tetapi juga dapat memengaruhi

How to cite: Juissa, A. A., Kurnianingsih, A., & Suryaningsi. (2026) Dampak Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Konservasi Alam: Studi Kasus Pandangan Staf BKSDA. *Journal of Modern Social and Humanities*, 2(1), 14-20. <https://doi.org/10.71094/jmsh.v2i1.271>

partisipasi dan peluang karir perempuan di bidang konservasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyaknya ketimpangan dalam pengelolaan lingkungan kerja dapat mempengaruhi kurangnya kontribusi perempuan di tingkat strategis, terutama dalam aktivitas lapangan yang membutuhkan keterampilan teknis dan fisik.

Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mempelajari kendala-kendala tersebut dengan menggunakan pendekatan teoretis ekofeminisme, konsep Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender (Moser), serta Kerangka Kehidupan Berkelanjutan (SLF). Dengan menggali kendala praktis ini lebih dalam, kajian ini berharap dapat memberikan banyak saran untuk pengintegrasian ramah gender dalam konservasi melalui penyediaan fasilitas dan kebijakan pendukung yang lebih inklusif.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat ilustratif. Data ini diambil melalui wawancara yang mendalam dengan salah satu seorang perempuan yang bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Kalimantan Timur. Informan ini dipilih secara sengaja dengan berdasarkan pengalaman beliau langsung selama di lapangan dan berbagai macam pengetahuan tentang tantangan infrastruktur konservasi.

Wawancara ini dilakukan dengan format semi-terstruktur untuk menggali pengalaman pribadi mengenai akses ke fasilitas, mobilitas di lapangan, serta keterlibatan dalam berbagai tugas konservasi. Data ini kemudian dianalisis dengan melakukan pendekatan tematik menggunakan tiga kerangka teori yang saling terkait yaitu:

- (1) Ekofeminisme, untuk memahami keterkaitan antara gender dan hubungan manusia dengan lingkungan;
- (2) Gender Analysis Framework (Moser), berfokus pada perbedaan antara kebutuhan praktis dan strategis berdasarkan aspek gender;
- (3) (3) Sustainable Livelihoods Framework (SLF), untuk mengamati hubungan antara aset, kerentanan, dan akses ke sumber daya konservasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Validasi Hambatan: Keterbatasan Fasilitas Dasar (Toilet & Air) di Lapangan

Penelitian ini menekankan bahwa kekurangan fasilitas dan infrastruktur merupakan kendala utama yang menghalangi partisipasi perempuan dalam kegiatan konservasi. Yaitu masalah kurangnya toilet, akses terhadap air bersih, dan hambatan dalam mobilitas secara langsung mempengaruhi pembagian kerja menurut gender dan mengurangi kesempatan perempuan untuk berperan aktif secara strategis. Hambatan ini bukan hanya ketidaknyamanan logistik, melainkan faktor kritis yang dapat menghambat keberhasilan program konservasi dan kesejahteraan personel yang terlibat. Solusi yang mungkin termasuk memperbaiki sistem transportasi air, menampung air hujan untuk kebutuhan non-konsumsi, atau menggunakan teknologi daur ulang air jika memungkinkan.

Memenuhi kebutuhan praktis terkait gender adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja konservasi yang setara. Investasi dalam fasilitas yang mendukung gender, bantuan mobilitas, dan kebijakan internal yang lebih peka terhadap gender harus menjadi fokus utama lembaga konservasi. Dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas dasar yang memadai, perempuan dapat

berpartisipasi langsung dengan sangat baik, memberikan kontribusi yang strategis, dan memperkuat keberlanjutan konservasi dalam jangka panjang.

3.2. Hambatan Mobilitas: Akses jalan, penerangan, Jarak, dan Keamanan

Sumber Tema kedua berhubungan dengan aksesibilitas. Narasumber menjelaskan bahwa banyak tempat konservasi di Kalimantan Timur memiliki jalan yang tidak baik, jarak yang jauh, kurangnya penerangan dan kurangnya transportasi. Keadaan ini memberikan dampak yang berbeda bagi perempuan, khususnya dalam hal:

Keamanan selama perjalanan (terutama pada malam hari), ada beberapa area konservasi berada di wilayah yang memiliki konflik sosial, aktivitas kriminal terorganisir (perdagangan satwa ilegal, penembangan liar yang berskala besar), atau bahkan ancaman-ancaman dari kelompok bersenjata.

Kemampuan untuk pulang pergi tanpa perlu menginap, terkadang para pekerja lapangan atau para peneliti diharuskan segera pulang tanpa menginap sama sekali. Kewajiban untuk kembali ke rumah demi mengurus keluarga, hal ini kembali lagi menjadi suatu kewajiban dan berkaitan dengan tanggung jawab moral dan prioritas hidup.

Kekhawatiran mengenai bahaya di medan yang sulit (hutan, sungai, dan medan terjal). Kekhawatiran mengenai bahaya di medan sulit selama kegiatan konservasi sangatlah valid dan memerlukan perencanaan yang sangat matang. Medan yang sulit, seperti lereng curam, hutan lebat, rawa-rawa, atau daerah-daerah yang terpencil, dapat menghadirkan berbagai risiko bagi para pekerja di lapangan dan para peneliti staf tersebut mengungkapkan bahwa:

"Sering kali lokasinya sangat jauh, minimnya penerangan/pencahayaan seperti lampu jalan di tempat-tempat tertentu, dan terkadang banyak area konservasi yang sering kali berada di lokasi terpencil atau sulit dijangkau, seperti hutan lebat, pegunungan, atau pulau terpencil. sehingga perempuan memang memerlukan rasa aman saat berada di lapangan."

Kutipan ini menunjukkan bahwa keamanan fisik dan mental merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan konservasi. Dan secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan fisik saja namun dapat mempengaruhi juga pergerakan/perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, juga berdampak pada kesehatan, ekonomi, pendidikan. Infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai juga dapat meningkatkan berbagai macam risiko, dan risiko-risiko yang bertumpuk ini secara umum akan lebih membatasi peranan perempuan dibandingkan dengan laki-laki dan ketertarikan Perempuan dalam kegiatan konservasi ini akan berkurang. Sedangkan peranan Perempuan dalam kegiatan konservasi ini lebih dibutuhkan, dikarenakan Perempuan dianggap memiliki tingkat ketelitian dan kesabaran yang tinggi.

3.3. Tanggapan Institusional: Upaya Ada, tetapi Masih Terbatas

Narasumber tersebut menyatakan bahwa BKSDA Kaltim menyadari pentingnya peran perempuan dan dalam beberapa tahun terakhir ini mereka mulai memperhatikan isu gender, terutama dalam: mengundang perempuan untuk berpartisipasi langsung dalam program-program mereka seperti sosialisasi, menyediakan fasilitas yang lebih mendukung bagi perempuan di beberapa Resort, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bekerja sebagai staf lapangan atau

penyuluh, meningkatkan kesadaran internal tentang kontribusi Perempuan dalam kegiatan konservasi.

Namun, ia juga mengakui bahwa kinerja institusi dalam menyediakan fasilitas fisik masih belum terlalu optimal, terutama disebabkan oleh: adanya keterbatasan dari anggaran, fokus pembangunan yang lebih banyak pada infrastruktur teknis (pos, pondok, menara), kebanyakan Resort yang akan dibangun jauh sebelum perspektif gender diterapkan. Staf tersebut juga mengungkapkan bahwa:

"Dari pihak kami di BKSDA, sebenarnya kami ingin memberikan dukungan, tetapi keadaan yang saat ini memang belum memungkinkan untuk semua Resort dilengkapi sepenuhnya. Karena hal ini harus dilakukan secara bertahap. Hal ini juga menunjukkan tentang adanya perbedaan yaitu antara keinginan institusional dan realitas di lapangan."

3.4. Peran Perempuan dalam Konservasi: Pengelola, Pendidik, dan Agen Perubahan

Tema terakhir menunjukkan bahwa narasumber memandang sangat positif yaitu peran perempuan dalam konservasi sangatlah penting dan beragam dalam bidang konservasi. Ia mengungkapkan bahwa peran perempuan adalah: sebagai pengelola sumber daya alam sehari-hari (air, makanan, energi), sebagai sarana pembawa nilai-nilai konservasi kepada anak-anak, kemudian sebagai pengawal keberlanjutan melalui dengan kegiatan rumah tangga, sebagai agen perubahan dengan melakukan pendekatan yang lebih sabar, lebih teliti, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kontribusi perempuan terhadap konservasi sangat mendasar. Ketika perempuan diberdayakan dan dilibatkan secara setara dalam pengambilan keputusan, upaya konservasi menjadi lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Perempuan memainkan banyak peran yang sangat penting dan beragam dalam konservasi lingkungan, sering kali perempuan bertindak sebagai tulang punggung dengan upaya keberlanjutan di komunitas lokal dan global. Peran mereka dapat dikategorikan secara efektif sebagai pengelola, pendidik, dan agen perubahan.

Dalam pernyataannya:

"Perempuan sesungguhnya adalah ujung tombak. Mereka lebih memperhatikan rincian, lebih sabar, dan sangat berperan penting dalam menjaga lingkungan dalam keluarga."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa secara nilai, institusi mengakui posisi strategis Perempuan dan secara keseluruhan, peran perempuan sangat fundamental karena mereka menjembatani antara kebutuhan sehari-hari manusia dengan kesehatan ekosistem lokal, mereka juga dapat memastikan bahwa upaya konservasi tersebut dapat bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan.. Namun, seperti yang dibahas dalam tema sebelumnya, pengakuan ini belum sepenuhnya tercermin dalam fasilitas dan infrastruktur yang ada.

3.4.1. Figure and Table

Figure 1. mendokumentasikan seorang perempuan konservator BKSDA yang sedang menggendong seekor monyet hasil penyelamatan di kawasan hutan konservasi. Gambar ini menggambarkan kedekatan emosional dan profesional antara petugas perempuan dan satwa liar yang ditangani. Dokumentasi tersebut menegaskan bahwa perempuan memiliki peran signifikan dalam proses rehabilitasi, penanganan darurat, dan pemulihan satwa sebelum dilepas liarkan kembali.

Table 1.

Table Head	Table Column Head		
Peran Perempuan di BKSDA	Peran Teknis: Penanganan Satwa	Evaluasi	Rehabilitas
Perempuan terlibat dalam proses evakuasi satwa liar, termasuk menggendong monyet hasil penyelamatan.	Mereka juga berperan dalam pemantauan kesehatan awal sebelum satwa dipindahkan ke pusat rehabilitasi.		

Sample of a Table footnote. (Table footnote)



Figure 1. Peran Perempuan dalam konservasi. (rehabilitasi orang utan)

4. Kesimpulan

Peran Penelitian ini menekankan bahwa kekurangan fasilitas dan infrastruktur merupakan kendala utama yang menghalangi partisipasi perempuan dalam kegiatan konservasi. Masalah kurangnya toilet, akses terhadap air bersih, dan hambatan dalam mobilitas secara langsung mempengaruhi pembagian kerja menurut gender dan mengurangi kesempatan perempuan untuk berperan secara strategis. Konservasi alam memerlukan peran Perempuan dikarenakan perempuan memainkan peran fundamental dan multidimensi dalam konservasi alam, perempuan bertindak sebagai penjaga akar rumput, berperan sebagai pendidik, sebagai penggerak komunitas, dan berperan sebagai pengambil keputusan rumah tangga, mereka sering kali membawa pendekatan kolaboratif dan banyaknya pengetahuan tradisional untuk melestarikan keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, serta membangun ketahanan lingkungan, menjadikannya pilar penting dalam upaya pelestarian lingkungan secara global.

Dengan memenuhi kebutuhan praktis terkait gender adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja konservasi yang setara. Investasi dalam fasilitas yang mendukung ramah gender, bantuan mobilitas, dan kebijakan internal yang lebih peka terhadap gender harus menjadi fokus utama pada lembaga konservasi. Dengan menyediakan

infrastruktur dan fasilitas dasar yang memadai, perempuan dapat berpartisipasi langsung dengan lebih baik, memberikan kontribusi yang strategis, dan memperkuat keberlanjutan konservasi dalam jangka panjang. Memastikan partisipasi yang setara dari semua gender dalam badan pengambil keputusan konservasi.

Acknowledgment (Ucapan Terima Kasih)

Peneliti menyampaikan rasa syukur dan banyak-banyak terima kasih kepada tim BKSDA yang ada di Kalimantan Timur karena telah membantu kami dalam melakukan wawancara, dan bersedia terlibat langsung dalam membantu kami dengan memberikan data penting dalam studi ini.

Daftar Pustaka

- Agarwal, B. (2021). Gendered impacts of climate change vs. women's agency: Implications for sustainable development. *Journal of Sustainable Development*, 29(4), 345-367.
- Arora-Jonsson, S. (2022). The burden of representation: Women, climate policy, and the limits of participation. *Climate and Development*, 14(3), 211-225.
- Bennett, N. J., et al. (2021). Social equity and impacts of conservation. *Conservation Science and Practice*, 3(5), e394.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2024). *Statistik Gender dan Akses Infrastruktur Indonesia 2024*. BPS.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage publications.
- Chambers, R., & Conway, G. (1992). Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century. *IDS Discussion Paper* 296.
- Chigwanda, P. (2023). Gender, infrastructure, and rural livelihoods: The burden of water collection in Sub-Saharan Africa. *Water Policy*, 25(1), 88-104.
- Clement, F., & Kkapil, M. (2022). Beyond tokenism: Gender mainstreaming in community forestry in Nepal. *Forest, Trees and Livelihoods*, 31(2), 101-118.
- Dutta, S. (2023). Ecofeminist philosophy and the call for sustainable policy. *Environmental Values*, 32(4), 451-470.
- Elmhirst, R., & Resurreccion, B. P. (2022). Gender, infrastructure, and the new extractive frontiers. *Journal of Rural Studies*, 92, 234-242.
- FAO (Food and Agriculture Organization). (2023). *The status of women in agrifood systems*. FAO.
- GGGI (Global Green Growth Institute). (2021). *Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Strategy 2021-2025*. GGGI.
- Gupta, D., & Kelkar, G. (2022). Ecofeminism in the Global South: Linking gender, environment, and local knowledge. *Gender, Technology and Development*, 26(1), 1-19.
- JICA (Japan International Cooperation Agency). (2023). *Gender and Development (GAD) approach: Practical vs. strategic needs analysis*. JICA.
- Leimona, B., et al. (2022). Applying the Sustainable Livelihoods Framework in Indonesian agroforestry: The role of physical and financial capital. *Journal of Agroforestry Systems*, 96(3), 551-565.
- Li, T. M. (2021). The burden of participation: Gender and the politics of community-based conservation. *Development and Change*, 52(4), 781-805.
- Mies, M., & Shiva, V. (1993). *Ecofeminism*. Zed Books.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice, and training*. Routledge.

-
- Puspitasari, A., & Wulandari, C. (2024). Analisis Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender dalam Program Perhutanan Sosial di Jawa Timur. *Jurnal Studi Gender dan Pembangunan*, 3(1), 45-60.
- Rawluk, A., Toumbourou, T. D., et al. (2024). Gender inclusivity in Indonesian social forestry: Barriers to women's participation in decision-making. *Forest Policy and Economics*, 159, 103133.
- Sari, R. D., & Adnan, H. (2023). Dampak infrastruktur perdesaan terhadap alokasi waktu perempuan: Studi kasus di tiga provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(2), 112-128.
- Shiva, V. (1993). The gendering of the environment. *Development*, 36(1), 59-62.
- Toumbourou, T. D., Rawluk, A., et al. (2024). Women's exclusion from Indonesia's social forestry decisions risks greater inequality. *The Conversation Indonesia*.
- UNDP (United Nations Development Programme). (2022). Gender, climate security, and the infrastructure gap. UNDP.
- World Bank. (2023). Time poverty and the gender gap in unpaid care work: The role of infrastructure. World Bank Group.